



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020**



**PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

KATA PENGANTAR

Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi merupakan rancangan dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi atau Rencana Strategis Daerah (Renstrada).

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan tersusunnya Ranwal Renja 2020 ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tim Penyusun Renja 2020 yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan lptek, dan tantangan pembangunan ke depan, materi Renja yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI
NIP. 19640915 199002 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Dokumen Rencana Kerja (Renja).....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUN TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	37
2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat.....	46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	47
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	47
3.3 Program dan Kegiatan	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	64
BAB V PENUTUP	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi atau Rencana Strategis (RENSTRA). RKPD yang disusun oleh suatu daerah harus berisikan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi makro daerah dan rencana kerja serta sumber pendanaannya.

RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 merupakan dasar hukum perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai prinsip bagi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota, Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020. Renja digunakan sebagai acuan dan Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja PD merupakan pencapaian pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah dalam satu tahun apakah telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, belum memenuhi target atau melebihi target kinerja.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan renja PD untuk tahun yang sama.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif dari masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 yang rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk:

- a. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- c. Penyusunan rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, Renstra Kominfo, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah bidang komunikasi dan informatika antar Provinsi dengan Kabupaten/kota serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Secara umum pada tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika hanya melaksanakan 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu urusan wajib komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian dengan menyelenggarakan 4 (empat) program dan 16 (enam belas) kegiatan. Terdiri dari Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah, Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi, Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian. Di bawah ini diuraikan secara terperinci urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

2.1.1. Urusan Wajib yang Dilaksanakan

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 dengan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Induk sebesar Rp20.439.928.325,00 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp6.637.155.057,00 sedangkan untuk belanja langsung sebesar Rp13.802.773.268,00. Pada APBD Perubahan Tahun 2018, Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Rp17.422.668.613,00 (mengalami pengurangan sebesar Rp3.017.259.712,00) dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp6.439.895.345,00 dan belanja langsung sebesar Rp10.982.773.268,00. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp15.858.003.597,00 (91%), dengan sisa anggaran sebesar Rp1.564.665.016,00 (9%), yang terdiri dari realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp858.167.909,00 dan belanja langsung Rp706.497.107,00.

Adapun perincian uraian belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d tahun 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Tahun 2019 (Awal Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2018(n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD sampai dengan tahun 2019	
											Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat capaian Realisasi target Renstra s/d tahun 2019
1					2	3	4		5		6	7	8(7/6)	9	10(5+7+9)	11(10/4)
							%	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%
2	10	01	01		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	2.564.045.204			4.122.392.161	3.813.482.560	92,51%	2.564.045.204	6.377.527.764	248,73%
2	10	01	01	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan	100%	2.098.945.204			1.556.539.114	1.403.061.463	90,14%	2.098.945.204	3.502.006.667	166,85%
				02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran selama 12 bulan	100%	248.000.000			2.066.353.047	2.016.921.000	97,61%	248.000.000	2.264.921.000	913,27%
				03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat disiplinnya	0%	0			90.600.000	81.900.000	90,40%	0	81.900.000	#DIV/0!
				04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya	100%	172.500.000			324.850.000	238.270.097	73,35%	172.500.000	410.770.097	238,13%
				06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD dengan realisasi target diatas 90%	0%	0			57.350.000	52.560.000	91,65%	0	52.560.000	#DIV/0!
				07	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan PD dengan tingkat konsistensi thd konsistensi jangka menengah PD diatas 85%	100%	44.600.000			26.700.000	20.770.000	77,79%	44.600.000	65.370.000	146,57%

2	10	01	02		Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi	100%	2.568.030.000			3.029.205.000	2.862.346.336	94,49%	2.568.030.000	5.430.376.336	211,46%
				01	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	100%	946.380.000			1.534.780.000	1.465.305.926	95,47%	946.380.000	2.411.685.926	254,83%
				05	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah data/informasi publik pemda	100%	1.214.000.000			1.034.400.000	994.735.794	96,17%	1.214.000.000	2.208.735.794	181,94%
				07	Pengelolaan Kemitraan	Jumlah mitra yang terfasilitasi	100%	333.800.000			460.025.000	402.304.616	87,45%	333.800.000	736.104.616	220,52%
				08	Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah opini publik dan aspirasi publik	100%	73.850.000			0	0	0,00%	73.850.000	73.850.000	100,00%
2	10	01	03		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi		100%	6.020.552.480			3.296.250.000	3.103.130.045	94,14%	6.020.552.480	9.123.682.525	151,54%
				01	Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi	Jumlah dana pendampingan kapasitas layanan infrastruktur dan teknologi di daerah	100%	5.252.160.000			1.860.960.000	1.847.313.000	99,27%	5.252.160.000	7.099.473.000	135,17%
				03	Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government	Kapasitas layanan publik dan pemerintah berbasis e-government	100%	74.787.480			1.228.690.000	1.059.308.045	86,21%	74.787.480	1.134.095.525	1516,42%
				04	Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah	Kapasitas jaringan komunikasi data	100%	265.325.000			169.000.000	159.400.000	94,32%	265.325.000	424.725.000	160,08%
				06	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Sistem Informasi	Jumlah insiden atau penyimpangan sistem informasi	100%	42.500.000			37.600.000	37.109.000	98,69%	42.500.000	79.609.000	187,32%
				09	Perumusan Kebijakan Teknis dan SDM Keamanan Informasi	Jumlah kebijakan dan sertifikasi SDM di Bidang Keamanan Informasi	100%	385.780.000			0	0	0,00%	385.780.000	385.780.000	100,00%
															0	#DIV/0!

2	10	01	04		Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian		100%	529.452.335			534.926.107	497.317.220	92,97%	529.452.335	1.026.769.555	193,93%
				03	Inventarisasi dan Pengelolaan data sektoral daerah	Jumlah Ketersediaan Data Informasi Statistik Daerah yang telah diinventarisasi dan diolah	100%	31.175.000			152.720.000	135.109.000	88,47%	31.175.000	166.284.000	533,39%
				05	Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Sektoral dan Spatial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Format Dashboard	Jumlah layanan interaktif pemerintah dan masyarakat 6 kabupaten	100%	312.134.550			0	0	0,00%	312.134.550	312.134.550	100,00%
				06	Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah layanan interaktif pemerintah dan masyarakat 6 kabupaten	100%	89.264.000			340.799.622	325.001.500	95,36%	89.264.000	414.265.500	464,09%
				07	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian	Jumlah layanan persandian yang bisa dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	100%	12.633.785			41.406.485	37.206.720	89,86%	12.633.785	49.840.505	394,50%
				08	Pengembangan, Pengelolaan dan optimalisasi Pemanfaatan Data/Informasi/Statistik Daerah	Jumlah buku statistik daerah yang dicetak	100%	84.245.000			0	0	0,00%	84.245.000	84.245.000	100,00%
1	25	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			96,54%	3.772.094.695				3.772.094.695	#DIV/0!	
	25	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat			86,72%	8.477.200				8.477.200	#DIV/0!	
	25	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran rekening telpon dan internet berlangganan			99,26%	1.875.998.550				1.875.998.550	#DIV/0!	
	25	1	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya belanja jasa service, penggantian suku cadang, belanja BBM, pembayaran STNK, belanja ban dan Accu kendaraan			83,54%	311.879.438				311.879.438	#DIV/0!	
	25	1	1	7	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honorarium jasa adm. keuangan sebanyak 20 orang			96,28%	126.450.000				126.450.000	#DIV/0!	

	25	1	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya belanja peralatan kebersihan kantor			99,41%	17.894.500					17.894.500	#DIV/0!
	25	1	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan berupa komputer, laptop, mesin fotokopi, printer, telepon dan dispenser			67,33%	10.100.000					10.100.000	#DIV/0!
	25	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor			99,93%	93.735.000					93.735.000	#DIV/0!
	25	1	1	12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan			89,27%	26.780.000					26.780.000	#DIV/0!
	25	1	1	13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			100,00%	25.000.000					25.000.000	#DIV/0!
	25	1	1	14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa piring/gelas/mangkok/gorden/komputer,note book/laptop, AC,kamera dan printer			91,26%	461.675.885					461.675.885	#DIV/0!
	25	1	1	16	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar harian lokal dan nasional, majalah komputer bulanan dan majalah mingguan nasional			99,90%	39.960.000					39.960.000	#DIV/0!
	25	1	1	17	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor berupa isi air mineral dan isi ulang tabung gas			97,97%	10.777.000					10.777.000	#DIV/0!
	25	1	1	18	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat dan tamu			100,00%	44.000.000					44.000.000	#DIV/0!
	25	1	1	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah melalui perjalanan dinas			99,96%	199.912.709					199.912.709	#DIV/0!
	25	1	1	20	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa penunjang Administrasi			100,00%	371.890.000					371.890.000	#DIV/0!
	25	1	1	97	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			98,38%	147.564.413					147.564.413	#DIV/0!
															0	#DIV/0!

2	25	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		98,67%	233.854.000					233.854.000	#DIV/0!
	25	1	2	67	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan Kendaraan dinas/operasiona		98,34%	183900000					183.900.000	#DIV/0!
	25	1	2	156	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1,00	49.954.000					49.954.000	#DIV/0!
	25	1	2	1000	Pengadaan Meubeulair	Terlaksananya Pengadaan Meubeulair								0	#DIV/0!
														0	#DIV/0!
3	25	1	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur		100%	11.600.000					11.600.000	#DIV/0!
	25	1	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya		100%	11.600.000					11.600.000	#DIV/0!
														0	#DIV/0!
4	25	1	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		85,06%	3.873.205.665					3.873.205.665	#DIV/0!
	25	1	15	11	Pengelolaan dan Operasional Jaringan Hotspot	Terlaksananya operasional titik- titik hotspot di 6 kabupaten		90,31%	194.817.335					194.817.335	#DIV/0!
	25	1	15	15	Pengelolaan dan Operasionalisasi Mobile Community Access Point (M-CAP)	Terlaksananya operasional Mobile Community Access Point (M-CAP) ke Kab/Kota		76,78%	111.399.202					111.399.202	#DIV/0!
	25	1	15	25	Pengelolaan dan Operasional Media Center Provinsi Kep.Bangka Belitung	Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada publik selama 1 (satu) tahun		75,00%	126.915.864					126.915.864	#DIV/0!
	25	1	15	26	Pengelolaan dan Operasional Stasiun Radio	Terlaksananya penyebaran informasi program pembangunan daerah melalui Info Radio		94,94%	471.809.027					471.809.027	#DIV/0!
	25	1	15	47	Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda) Pemerintah Prov.Kep.Babel	Terlaksananya sosialisasi kerawanan keamanan informasi dan komunikasi Raker Teknis dan Monev Jaring Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda) Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan pihak/dinas terkait		89,48%	84.154.740					84.154.740	#DIV/0!
	25	1	15	71	Penguatan Jaringan Komunikasi Data SKPD	Tersedianya media akses komunikasi data di internal tiap SKPD		87,72%	304.275.728					304.275.728	#DIV/0!

	25	1	15	84	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kep. Babel melalui TVRI	Terlaksananya penyebaran informasi program-program pembangunan daerah, edukasi dan hiburan kepada masyarakat melalui TVRI Bangka Belitung			98,44%	490.270.552				490.270.552	#DIV/0!
	25	1	15	86	Peningkatan Fungsi Pelayanan Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pelaksanaan tugas dan fungsi KID Prov.Kep.Babel dan Sekretariat Daerah			95,84%	556.551.273				556.551.273	#DIV/0!
	25	1	15	87	Seleksi Anggota Komisi Inormasi Daerah (KID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terseleksinya anggota KID			99,62%	84.279.962				84.279.962	#DIV/0!
	25	1	15	88	Pengadaan dan Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi Dasar Umum Pemerintah	Tersedianya perangkat lunak dasar umum pemerintahan di lingkungan Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung			94,52%	477.068.595				477.068.595	#DIV/0!
	25	1	15	89	Pembangunan dan Pengembangan Portal Prov. Kep. Bangka Belitung	Tersedianya media informasi berbasis website sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat			86,51%	70.211.000				70.211.000	#DIV/0!
	25	1	15	94	Pengelolaan Disaster Recovery Center (DRC)	Tersedianya pengelolaan dan operasional jaringan DRC			91,71%	197.110.960				197.110.960	#DIV/0!
	25	1	15	95	Peningkatan Fungsi Pelayanan Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Prov. Kep. Bangka Belitung	Pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Informasi Daerah Prov.Kep.Babel dan Sekretariat KPID			98,00%	704.341.427				704.341.427	#DIV/0!
	25	1	15	97	Implementasi Aplikasi Smart Citizen	Tersedianya Tim Task Force yang akan memonitoring System Dashboard Smart Citizen di Provinsi dan 7 kab/Kota			0	0				0	#DIV/0!
	25	1	15	6503	Pengadaan dan OM Peralatan Perangkat Radio Telekomunikasi Tetap dan Bergerak	Tersedianya repeater (pemancar ulang) radio komunikasi bergerak di gunung Mangkol dan gunung Sajam			0	0				0	#DIV/0!
	25	1	15	6900	Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Kominfo	Terwujudnya Monev perencanaan bidang Kominfo			0	0				0	#DIV/0!
														0	#DIV/0!

5	25	1	16		Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika	Data mengenai penyelenggaraan, pemakaian dan penempatan objek-objek telekomunikasi								0	#DIV/0!
	25	1	16	1300	Penyelenggaraan dan Pengendalian Bidang Telekomunikasi	Terdatanya penyelenggara dan Objek-objek Telekomunikasi			0	0				0	#DIV/0!
														0	#DIV/0!
6	25	15	17		Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Terwujudnya kualitas SDM bidang TIK			73,74%	88.086.889				88.086.889	#DIV/0!
	25	15	17	600	Rapat Koordinasi Forum SKPD	Terlaksananya peningkatan kerjasama Diskominfo se - Babel								0	#DIV/0!
	25	15	17	701	Peningkatan Kapasitas SDM Kominfo	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kominfo								0	#DIV/0!
	25	15	17	9	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Bidang Komunikasi dan Kehumasan	Terlaksananya pelatihan bagi aparatur pemerintah bidang komunikasi			0	0				0	#DIV/0!
	25	15	17	17	Pelatihan SDM Aparatur Pemerintah Bidang Pengelolaan TIK	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam mengelola pengembangan/pengelolaan websiter dan pengembangan aplikasi			95,90%	49.123.540				49.123.540	#DIV/0!
	25	15	17	20	Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Terlaksananya Rakor KIM se-Babel dan pertemuan KIM tingkat Nasional			0	0				0	#DIV/0!
	25	15	17	25	Penilaian Jabatan Fungsional Komputer	Terlaksananya penilaian Angka Kredit (PAK) jabatan fungsional pranata komputer			50,86%	30.298.504				30.298.504	#DIV/0!
	25	15	17	27	Jabatan penilaian Jabatan Pranata Humas	Terlaksananya Penilaian kinerja pejabat fungsional pranata humas			100%	8.664.845				8.664.845	#DIV/0!
	25	15	17	1700	Sertifikasi SDM Pengelola TIK	Terlaksananya Sertifikasi SDM Pengelola TIK								0	#DIV/0!
														0	#DIV/0!
7	25	15	18		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Kerjasama informasi dengan mass media			94,11%	828.461.052				828.461.052	#DIV/0!

	25	15	18	16	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Cetak	Terjalannya kerjasama dalam penyebaran informasi daerah dan kegiatan Pemprov Kep.Babel melalui media cetak , elektronik maupun media daring/online			99,36%	181.885.757					181.885.757	#DIV/0!
	25	15	18	17	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Elektronik	Terjalannya kerjasama dengan media elektronik dan media online			92,74%	646.575.295					646.575.295	#DIV/0!

Pangkalpinang, Maret 2019
Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI
NIP. 19640915 199002 1 002

Belanja Tidak Langsung

Untuk Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai yang terdiri dari Gaji dan tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS. Pada APBD induk Belanja Tidak Langsung pada tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp6.637.155.057,00 yang kemudian mengalami kenaikan pada APBD Perubahan Tahun 2018 sebesar Rp6.439.895.345,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.581.727.436,00 atau 86,67% dengan sisa anggaran sebesar Rp858.167.909,00 atau 13,33%.

Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai digunakan untuk membiayai Gaji dan tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 sebanyak 43 (empat puluh tiga) pegawai, dengan status kepegawaian 43 (empat puluh tiga) orang PNS. Kualifikasi pendidikan pegawai terdiri dari S3 sebanyak 1 (satu) orang, S2 sebanyak 5 (lima) orang, S1 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, D3 sebanyak 12 (dua belas) orang, dan SLTA sebanyak 3 (tiga) orang. Berdasarkan eselonering yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 (satu) orang, eselon III sebanyak 3 (tiga) orang dan eselon IV sebanyak 11 (sebelas) orang.

Belanja Langsung meliputi :

I. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar 1.556.539.114,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.403.061.463,00 atau 90,14%. Keluaran kegiatan adalah kebutuhan ATK selama 12 bulan, belanja meterai, belanja bahan keperluan kantor, pembayaran listrik, telepon, surat kabar dan kebutuhan kantor lainnya.
2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.066.353.047,00, realisasi anggaran sebesar Rp2.016.921.000,00 atau 97,61%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan kantor, belanja konsultasi, pembangunan gedung data center .

3. Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp90.600.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp81.900.000,00 atau 90,40%. Keluaran kegiatan adalah terpenuhinya pakaian dinas harian pegawai dan batik cual.
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp324.850.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp238.270.097,00 atau 73,35%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya kegiatan bimbingan teknis pengelolaan TIK dan ASN yang mengikuti kursus-kursus singkat/bimtek.
5. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.700.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp20.770.000,00 atau 77,79%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya penyusunan 2 (dua) dokumen perencanaan yaitu dokumen Rencana Kerja 2019 dan Renca Kerja Perubahan 2018.
6. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp57.350.000,00. realisasi anggaran sebesar Rp52.560.000,00 atau 91,65%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya penyusunan 5 (lima) laporan yaitu Laporan Pengendalian dan Evaluasi Triwulan PD (Dalev), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Semester Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

II. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Kegiatan Pengelolaan saluran komunikasi pemerintah daerah dan non pemerintah daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.534.780.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.465.305.926,00 atau 95,47%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah saluran komunikasi yang dikelola sebanyak 10 saluran. Yaitu saluran LPPL Info Radio termasuk pengelolaan inradiofm.com, LPP TVRI Bangka Belitung, LPP RRI Sungailiat, LKBN ANTARA, Radio Pratama, Radio HS, Radio

Sonora, LPB Pesona TV, Media Cetak (cetak spanduk), Baliho 2 unit (1 unit di jalan Selindung dan 1 unit di jalan Gadung).

2. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.034.400.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp994.735.794,00 atau 96,17%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah data/informasi pemerintah daerah berupa 840 informasi berupa berita-berita yang disebarakan melalui media cetak maupun elektronik, 1 pameran kegiatan KTNA Expo di Alun-alun Taman Merdeka Pangkalpinang, 2 pertemuan kegiatan rapat di Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Barat.
3. Kegiatan Pengelolaan Kemitraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp460.025.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp402.304.616,00 atau 87,45%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah mitra yang terfasilitasi sebanyak 50 kemitraan. Kemitraan tersebut seperti TVRI, RRI, Radio swasta, Jasa pengiriman, Loka Monitor, Bandara dan sebagainya.

III. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Daerah

1. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.860.960.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.847.313.000,00 atau 99,27%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah layanan infrastruktur dan teknologi berupa 1 paket colocation, 3 paket internet dalam 12 bulan layanan.
2. Kegiatan Layanan Publik dan Pemerintah berbasis e-Government dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.228.690.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.059.308.045,00 atau 86,21%. Keluaran kegiatan ini adalah kapasitas layanan publik dan pemerintah berbasis e-Government sejumlah 1 aplikasi layanan mobile/babelprov (Sibabel), 2 lisensi pendukung (WHM dan cPanel, update 40 website (website Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

3. Kegiatan Penguatan jaringan komunikasi data pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp169.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp159.400.000,00 atau 94,32%. Keluaran kegiatan ini adalah Kapasitas jaringan komunikasi data sejumlah 8 interkoneksi di bagian Widyaaiswara 3 kelas, UMKM 2 ruangan dan Bumi Perkemahan SWBB 3 titik.
4. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Sistem Informasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp37.600.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp37.109.000,00 atau 98,69%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi adalah 0 insiden.

IV. Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian

1. Kegiatan Inventarisasi dan Pengelolaan Data sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp152.720.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp135.109.000,00 atau 88,47%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah ketersediaan data informasi statistik daerah yang telah diinventarisasi dan diolah adalah 8 (delapan) kelompok parameter data. Yaitu data umum, data ekonomi dan keuangan, data infrastruktur, data politik, hukum dan keamanan, data industri, data SDA, data sosial budaya dan data insidental.
2. Kegiatan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp340.799.622,00 realisasi anggaran sebesar Rp325.001.500,00 atau 95,36%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah layanan interaktif pemerintah dan masyarakat 6 kabupaten berupa layanan interaktif di Kabupaten Bangka Selatan (Toboali), Kabupaten Bangka (Balunijuk, Pugul, Kenanga, Kemuja), Kabupaten Bangka Tengah (Koba, Teru, Air Pelempang) dan Kabupaten Bangka Barat (Kelumbi dan Tempilang).
3. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.406.485,00 realisasi

anggaran sebesar Rp37.206.720,00 atau 89,86%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah layanan persandian yang bisa dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah Pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 3 (tiga) layanan. Yaitu layanan Pengamanan Berita, Pengamanan Informasi dan Operasional Jammer untuk rapat-rapat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk mencapai pelayanan yang optimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara.

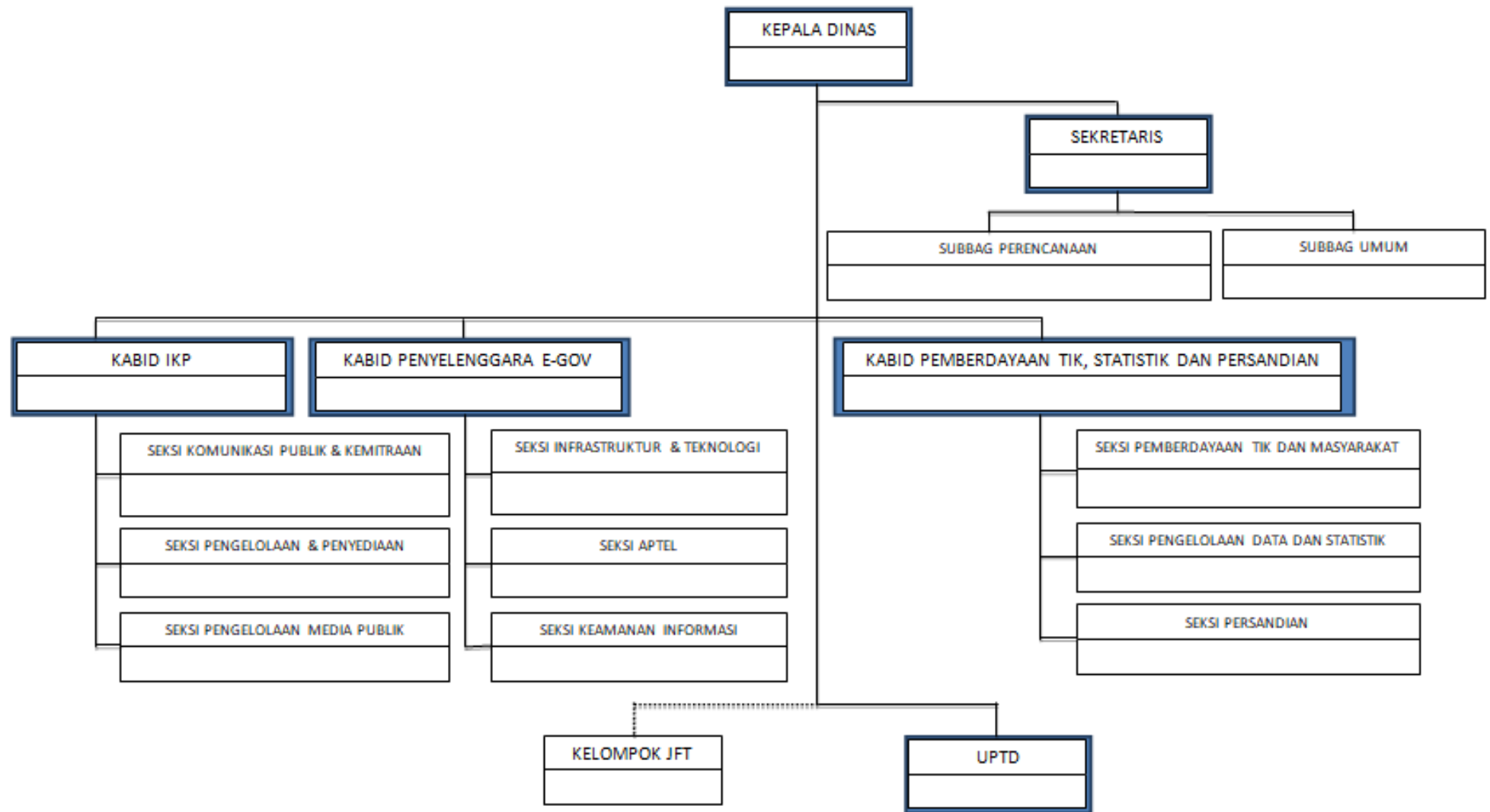
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2007, struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

- a. 1 (satu) jabatan Kepala Dinas yang setara dengan jabatan eselon IIa
- b. 1 (satu) jabatan Sekretaris Dinas yang setara dengan jabatan eselon IIIa.
- c. 3 (Tiga) jabatan Kepala Bidang yang setara dengan jabatan eselon IIIa.
- d. 2 (tiga) jabatan Kepala Sub Bagian yang berada di Sekretariat yang setara dengan jabatan eselon IVa.
- e. 9 (sembilan) jabatan Kepala Sub Bidang yang berada di Bidang yang setara dengan jabatan eselon IVa.

Di bawah ini adalah struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2018 dalam melaksanakan pengelolaan urusan Pemerintahan didukung sebanyak 43 orang pegawai (PNS). Kualifikasi Pendidikan Pegawai S3 sebanyak 1 (satu) orang, S2 sebanyak 5 (lima) orang, S1 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, D3 sebanyak 12 (dua belas) orang, SLTA sebanyak 3 (tiga) orang. Berdasarkan eselonering yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 (satu) orang, eselon III sebanyak 3 (tiga) orang dan eselon IV sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Klasifikasi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 berdasarkan jenjang pendidikan, eselonering dan klasifikasi berdasarkan golongan adalah seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.1
Klasifikasi PNS dan CPNS di Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	1	-	1
2	Pasca Sarjana/ S2	4	1	5
3	Sarjana / S1	15	7	22
4	Diploma-IV	-	-	-
5	Diploma-III	6	6	12
6	Diploma-I/II	-	-	-
7	SLTA	2	1	3
	JUMLAH	28	15	43

Tabel 2.2.2
Klasifikasi PNS dan CPNS di Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Eselonering

No	Tingkat Eselon	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	II	1	-	1
2	III	3	-	3
3	IV	9	2	11
4	JFU	10	7	17

5	JFT	4	7	11
	JUMLAH	27	16	43

Dilihat dari tabel di atas bahwa personil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah terlihat beragam dari segi golongan maupun pendidikan.

Tugas Pokok dan Fungsi :

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tugas : Memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya

Fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
2. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas komunikasi dan Informatika;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
5. Penyelenggaraan dan pengordinasian UPTD;
6. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi pegawai Aparatur Sipil negara;
7. Penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
8. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan.

SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tugas : Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan bidang-bidang.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, bidang statistik, yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
2. Penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Penyelenggaraan Pembinaan dan promosi pegawai;
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan;

A. SUBBAG PERENCANAAN

Tugas : melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.

B. SUBBAG UMUM

Tugas : Melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan, urusan kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Tugas : Memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik.

A. Seksi Komunikasi Publik dan Kemitraan

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan, perumusan kebijakan teknis komunikasi publik dan kemitraan.

B. Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis.

C. Seksi Pengelolaan Media Publik

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengelolaan media publik.

BIDANG PENYELENGGARAAN e-GOVERNMENT

Tugas : memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang e-Government.

A. Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis infrastruktur dan teknologi.

B. Seksi Aplikasi Telematika

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis aplikasi telematika.

C. Seksi Keamanan Informasi

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis keamanan informasi.

BIDANG PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK, PERSANDIAN

Tugas: memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan TIK, statistik dan persandian.

A. Seksi Pemberdayaan TIK dan Masyarakat

Tugas: menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan TIK dan masyarakat.

B. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik.

Kajian atas indikator kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA
1	Non Urusan		
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Predikat (nilai) SAKIP perangkat daerah	100% 4 Nilai
	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan	43 orang
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran selama 12 bulan	43 orang
	Peningkatan disiplin aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat disiplinnya	43 orang
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya	200 orang
	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah	2 dokumen
	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90%	5 laporan
2	Statistik		
	Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, statistik dan persandian	Persentase Data dan informasi statistik yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan.	

	Pengembangan system informasi basis data sektoral dan spatial berbasis dashboard	Jumlah layanan sistem informasi data sektoral dan spatial.	1 aplikasi
	Inventarisasi dan pengelolaan data sektoral	Jumlah Data informasi statistik daerah yang telah di inventarisasi dan diolah.	8 kelompok parameter
	Pengembangan, pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan data/informasi/ statistik daerah	Jumlah Informasi statistik daerah yang dipublikasikan	Buku
3	Komunikasi dan Informatika		
	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase kesesuaian informasi publik terhadap kebijakan/program daerah yang dapat diakses masyarakat.	
	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah daerah dan non pemerintah daerah	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	10 Saluran
	Pengelolaan Konten	Jumlah konten yang dimutakhirkan dan dikembangkan.	370 konten
	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Jumlah data/informasi publik pemda yang update.	-
	Pengelolaan kemitraan	Jumlah mitra yang terfasilitasi	132 mitra
	Pengelolaan aspirasi public lingkup pemerintah daerah	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi publik pemda	420 aspirasi/bln
	Pengelolaan komunikasi public	Jumlah konferensi pers dan wartawan	170 pengelolaan komunikasi
	Program Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Infrastruktur penyelenggaraan Pemerintah berbasis teknologi Persentase penyelenggaraan pemerintah yang berbasis Teknologi Informasi Persentase sistem informasi pemerintah daerah yang aman	
	Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi	Jumlah layanan infrastruktur dan teknologi informasi.	3 layanan; layanan jaringan internet/intranet, layanan Data Center, layanan DRC
	Layanan public dan pemerintah berbasis e-Government	Kapasitas layanan publik dan pemerintah berbasis e-government	
	Pembangunan media penyebaran informasi masyarakat	Jumlah media penyebaran informasi masyarakat	2 lokasi

	Penguatan jaringan komunikasi data pemerintah	Kapasitas jaringan komunikasi data	6 OPD/ interkoneksi
	Pengawasan dan pengendalian keamanan sistem informasi	Jumlah insiden atau serangan terhadap keamanan data dan informasi pemerintah prov. kep. Babel dan daerah yang terkait.	0 insiden
	Perumusan kebijakan teknis dan SDM keamanan informasi	Nilai kematangan/maturity level disetiap kontrol keamanan informasi, Jumlah SDM pengelola keamanan informasi	1 kebijakan dan 3 Ahli Keamanan Informasi
	Program Pemberdayaan TIK, Statistik dan persandian	Persentase masyarakat yang mendapat pemberdayaan TIK	40%
	Pemberdayaan Teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah masyarakat yang mendapat pemberdayaan TIK.	20 layanan
4	Urusan Persandian		
	Program Pemberdayaan TIK, Statistik dan persandian	Persentase PD yang memanfaatkan layanan persandian	
	Pengelolaan dan pengembangan sumber daya persandian	Jumlah PD yang memanfaatkan layanan persandian	5 layanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan informatika, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika yang selama ini telah dilaksanakan, yaitu meliputi belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan layanan komunikasi, informatika dan penyiaran terutama di daerah pesisir, pulau-pulau kecil dan tertinggal, belum optimalnya pengembangan layanan *e-Government* yang ditunjukkan dengan masih rendahnya instansi yang memanfaatkan layanan *e-Government* yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi.

Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan informatika, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika yang selama ini telah dilaksanakan, yaitu meliputi belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran terutama di daerah pesisir, pulau-pulau kecil dan tertinggal, belum optimalnya pengembangan layanan *e-Government* yang ditunjukkan dengan masih rendahnya instansi yang memanfaatkan layanan *e-Government* yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Nasional dan masih rendahnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kebutuhan akan aksesibilitas telekomunikasi (internet/data) pada titik titik kawasan pariwisata baru dan kawasan-kawasan strategis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi suatu tantangan baru bagi sektor Komunikasi dan Informatika dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat Bangka Belitung serta terbangunnya kampung-kampung internet di wilayah pesisir, 1.388 *site* BTS yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi Masyarakat.

Ketersediaan perencanaan umum/*grand design* kematangan Teknologi Informasi/*Maturity* IT dapat dijadikan tolok ukur untuk pengembangan Teknologi Informasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Urusan Statistik

Pada urusan statistik, terutama statistik sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah, ketersediaan data serta *up-dating* data dan informasi yang akurat menjadi hal yang penting untuk diperkuat, terutama kaitannya sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, selain itu data tersebut dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing.

Urusan Persandian

Persandian selama lima tahun terakhir belum memiliki struktural eselon empat yang khusus menangani urusan Persandian ini, sejak adanya perubahan terhadap SOTK di masing-masing perangkat daerah, mulai tahun 2017 Struktural Persandian muncul. Fokus urusan persandian ini dalam lima tahun kedepan adalah: (a). jumlah layanan persandian yang dimanfaatkan oleh Perangkat daerah untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (b). jumlah Penanganan terhadap insiden atau penyimpangan sistem informasi, semakin kecil insiden yang terjadi pada setiap tahunnya merupakan bagian dari indikator kinerja dari urusan persandian. Sehingga diharapkan pada setiap tahunnya jumlah insiden atau penyimpangan sistem informasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak lebih besar dari Nol. Dan (c). adanya kebijakan teknis dan dukungan SDM dibidang keamanan informasi, akan tetapi permasalahan keamanan informasi pada implementasinya berada pada struktural yang berbeda di dalam SOTK yang diterapkan di Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika. Sinergitas antara keamanan informasi dan persandian sangatlah erat hal ini dapat dilihat dari dukungan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan pada lima tahun kedepan dalam rangka meningkatkan kemandirian informasi dan persandian dan belum dilaksanakannya sertifikasi elektronik di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini

Meskipun telah dicapai kemajuan di bidang komunikasi dan informatika, tetap saja masih ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Permasalahan di bidang Komunikasi dan Informatika antara lain :

- a. Terhadap kewenangan Telekomunikasi sesuai dengan Undang-undang 23 tahun 2014 tidak lagi merupakan urusan Pemerintah Daerah/Provinsi melainkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
- b. Masih rendahnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- c. Belum adanya grand design Kematangan (maturity) Teknologi Informasi yang berkaitan dengan e-government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Permasalahan di bidang Statistik antara lain :

- a. Belum optimalnya data sektoral yang berasal dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Permasalahan di bidang Persandian antara lain :

- a. Masih sedikitnya SDM Sandiman di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. Belum dilaksanakannya sertifikasi elektronik

Permasalahan-permasalahan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi tantangan yang harus diselesaikan guna pencapaian penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang optimal.

Adapun tantangan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian program prioritas adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi pengembangan jaringan komunikasi antar daerah yang efektif sebagai infrastruktur dasar dalam menunjang alih pengalaman dan data sumber daya antar daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Penyusunan media informasi berbasis teknologi informasi guna menunjang kegiatan pembangunan dan pengembangan investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Penyusunan sistem informasi dan komunikasi secara bertahap di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menunjang pengambilan keputusan;
4. Penelitian dan pengembangan inovasi pelayanan masyarakat di daerah Provinsi, Kabupaten/kota dengan berbasis teknologi informasi.

Berikut ini adalah Isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan informasi dan komunikasi publik.
2. Belum optimalnya penerapan *e-Government* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan data dan informasi yang akurat dan handal serta penyelenggaraan fungsi persandian.

Tabel 2.3
Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tujuan Sasaran RPJMD

	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Kebijakan Umum	Isu Strategis PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					Belum Optimalnya penyediaan dan pengelolaan data dan informasi yang akurat dan handal	Meningkatkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas	Meningkatnya layanan interaktif pemerintah kepada masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1. Persentase Perangkat daerah yang memanfaatkan layanan persandian 2. Persentase masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan TIK	Pengelolaan dan pengembangan sumber daya persandian Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
2	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Persentase dana pendampingan desa yang terlayani internet	Meningkatnya ketersediaan pelayanan jaringan internet bagi masyarakat		Belum optimalnya Penerapan <i>e-Government</i> di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatkan jaringan infrastruktur teknologi informasi untuk pemerintah daerah dan masyarakat	Meningkatnya jaringan infrastruktur teknologi informasi untuk layanan pemerintah dan layanan publik	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase infrastruktur penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi	1. Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan teknologi 2. Penguatan jaringan komunikasi data pemerintah
3	Birokrasi yang memiliki Pelayanan	Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang	Belum Optimalnya penyediaan dan	Meningkatkan pengukuran kinerja yang akurat dan	Meningkatnya data dan informasi yang digunakan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK	Persentase data dan informasi statistik yang	1. Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Sektoral & Spatial dengan

	publik yang berkualitas	Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	penyelenggaraan pelayanan publik	bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	pengelolaan data dan informasi yang akurat dan handal	akuntabel	untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan	DAN PERSANDIAN	digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan	Format Dashboard 2. Pengembangan satu data/ one data 3. Inventarisasi dan pengelolaan data sektoral daerah 4. Pengembangan, pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan data/ informasi/ statistik daerah 5. Peningkatan Kapasitas SDM pengelola data/informasi/ statistik daerah
4	Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	Belum optimalnya Penerapan <i>e-Government</i> di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatkan pengukuran kinerja yang akurat dan akuntabel	Meningkatnya Penerapan <i>e-Government</i> di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	1. Persentase penyelenggaraan pemerintah yang berbasis teknologi informasi 2. Persentase sistem informasi daerah yang aman	1. Pembangunan Media Penyebaran Informasi Masyarakat 2. Layanan Publik dan pemerintah berbasis e-Government 3. Perumusan Kebijakan teknis dan SDM keamanan Informasi 4. Pengawasan dan pengendalian keamanan sistem

										informasi
5	Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	Belum optimalnya pelayanan informasi dan komunikasi publik	Meningkatkan pengukuran kinerja yang akurat dan akuntabel	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kesesuaian informasi public terhadap kebijakan/ program daerah yang dapat diakses masyarakat	1. Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah 2. Pengelolaan Konten 3. Pengelolaan Data Informasi Publik 4. Pengelolaan Kemitraan 5. Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah 6. Pengelolaan Komunikasi Publik

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
NO	PROGRAM /KEGIATAN	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	NO	PROGRAM /KEGIATAN	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	100 %;4 Nilai	3.602.008.000		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	100 %;4 Nilai	3.602.008.000	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD	ProvinsiJumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	53 orang	2.491.850.000	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD	ProvinsiJumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	53 orang	2.491.850.000	

2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	53 orang	142.230.000	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	53 orang	142.230.000	
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	53 orang	134.650.000	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	53 orang	134.650.000	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	200 orang	591.828.000	4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	200 orang	591.828.000	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	2 Dokumen	182.635.000	5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	2 Dokumen	182.635.000	
6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	5 Laporan	58.815.000	6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	5 Laporan	58.815.000	
	Statistik						Statistik					

	Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian		Rasio Ketersediaan informasi sektoral prioritas pertahun	0	678.446.939		Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian		Rasio Ketersediaan informasi sektoral prioritas pertahun	0	678.446.939	
1	Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Sektoral dan Spatial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Format Dashboard	Provinsi	Jumlah layanan sistem informasi basis data spatial Prov Bangka Belitung dengan format dashboard	1 aplikasi	278.013.209	1	Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Sektoral dan Spatial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Format Dashboard	Provinsi	Jumlah layanan sistem informasi basis data spatial Prov Bangka Belitung dengan format dashboard	1 aplikasi	278.013.209	
4	Inventarisasi dan Pengelolaan Data Sektoral Daerah	SKPD	Jumlah ketersediaan data informasi statistik daerah yang telah diinventarisasi dan diolah	8 kelompok parameter	168.305.650	4	Inventarisasi dan Pengelolaan Data Sektoral Daerah	SKPD	Jumlah ketersediaan data informasi statistik daerah yang telah diinventarisasi dan diolah	8 kelompok parameter	168.305.650	
5	Pengembangan Satu Data/ One Data	Provinsi , Belitung , Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah	Jumlah aplikasi sistem informasi database dukungan kebijakan daerah	1 aplikasi	106.263.080	5	Pengembangan Satu Data/ One Data	Provinsi , Belitung , Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah	Jumlah aplikasi sistem informasi database dukungan kebijakan daerah	1 aplikasi	106.263.080	
6	Pengembangan, Pengelolaan dan Optimalisasi Pemanfaatan Data/Informasi/Statistik Daerah	Luar Daerah, Provinsi	Jumlah buku statistik daerah yang dicetak	200 Buku	125.865.000	6	Pengembangan, Pengelolaan dan Optimalisasi Pemanfaatan Data/Informasi/Statistik Daerah	Luar Daerah, Provinsi	Jumlah buku statistik daerah yang dicetak	200 Buku	125.865.000	
Komunikasi dan Informatika						Komunikasi dan Informatika						

	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase pemenuhan jaringan informasi di pulau terpencil; - Rasio intensitas informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata periode satu tahun; - Persentase jumlah sektor yang ada dengan informasi/ berita tiap sector yang dipublikasikan; Rasio informasi tentang pelayanan kesehatan dengan periode satu tahun; Persentase kesesuaian antara kuantitas berita dengan informasi yang dipublikasi	0 ;5 Jenis;13 Jenis;0 ;0	3.400.000.000		Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase pemenuhan jaringan informasi di pulau terpencil; - Rasio intensitas informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata periode satu tahun; - Persentase jumlah sektor yang ada dengan informasi/ berita tiap sector yang dipublikasikan; Rasio informasi tentang pelayanan kesehatan dengan periode satu tahun; Persentase kesesuaian antara kuantitas berita dengan informasi yang dipublikasi	0 ;5 Jenis;13 Jenis;0 ;0	3.400.000.000	
1	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Provinsi	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	10 Saluran	1.173.000.000	1	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Provinsi	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	10 Saluran	1.173.000.000	
2	Pengelolaan Konten	Provinsi	Jumlah pengemasan dan pengelolaan konten	370 konten	0	2	Pengelolaan Konten	Provinsi	Jumlah pengemasan dan pengelolaan konten	370 konten	0	

3	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Provinsi	Jumlah data/informasi pemerintah daerah Jumlah data/informasi pemerintah daerah Jumlah data/informasi pemerintah daerah	0 Pameran kegiatan 0 Pertemuan kegiatan 570 informasi/bln	1.216.060.000	3	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Provinsi	Jumlah data/informasi pemerintah daerah Jumlah data/informasi pemerintah daerah Jumlah data/informasi pemerintah daerah	0 Pameran kegiatan 0 Pertemuan kegiatan 570 informasi/bln	1.216.060.000	
4	Pengelolaan Kemitraan	Provinsi	Jumlah mitra yang terfasilitasi	132 kemitraan	707.147.000	4	Pengelolaan Kemitraan	Provinsi	Jumlah mitra yang terfasilitasi	132 kemitraan	707.147.000	
5	Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Luar Daerah, Provinsi	Jumlah opini publik dan aspirasi publik Jumlah opini publik dan aspirasi publik Jumlah opini publik dan aspirasi publik	420 aspirasi/bln 1 pertemuan 1 Bimtek/pelatihan	303.793.000	5	Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Luar Daerah, Provinsi	Jumlah opini publik dan aspirasi publik Jumlah opini publik dan aspirasi publik Jumlah opini publik dan aspirasi publik	420 aspirasi/bln 1 pertemuan 1 Bimtek/pelatihan	303.793.000	
6	Pengelolaan Komunikasi Publik	Luar Daerah, Provinsi	Jumlah konferensi pers dan wartawan	170 Pengelolaan komunikasi/bln	0	6	Pengelolaan Komunikasi Publik	Luar Daerah, Provinsi	Jumlah konferensi pers dan wartawan	170 Pengelolaan komunikasi/bln	0	

	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi		Rasio luas wilayah desa dengan luas cakupan pelayanan jaringan internet; Persentase SMA/SMK yang telah berbasis IT; Persentase insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi; - Persentase peningkatan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk birokrasi	5 Jaringan;1 Ada;0 ;0	6.621.678.000		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi		Rasio luas wilayah desa dengan luas cakupan pelayanan jaringan internet; Persentase SMA/SMK yang telah berbasis IT; Persentase insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi; - Persentase peningkatan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk birokrasi	5 Jaringan;1 Ada;0 ;0	6.621.678.000	
1	Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi	Provinsi	Jumlah layanan Infrastruktur dan teknologi Jumlah layanan Infrastruktur dan teknologi Jumlah layanan Infrastruktur dan teknologi	1 paket data center 1 paket colocation 2 paket internet (IP transit, Local Link, Hotspot)	3.604.560.000	1	Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi	Provinsi	Jumlah layanan Infrastruktur dan teknologi Jumlah layanan Infrastruktur dan teknologi Jumlah layanan Infrastruktur dan teknologi	1 paket data center 1 paket colocation 2 paket internet (IP transit, Local Link, Hotspot)	3.604.560.000	

2	Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government	Provinsi	kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government	7 lisensi aplikasi pendukung 6 aplikasi layanan 40 website	982.630.000	2	Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government	Provinsi	kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government	7 lisensi aplikasi pendukung 6 aplikasi layanan 40 website	982.630.000	
3	Pembangunan Media Penyebaran Informasi Masyarakat	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat	Jumlah Media Penyebaran Informasi Masyarakat Jumlah Media Penyebaran Informasi Masyarakat	2 lokasi 5 unit operasional	0	3	Pembangunan Media Penyebaran Informasi Masyarakat	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat	Jumlah Media Penyebaran Informasi Masyarakat Jumlah Media Penyebaran Informasi Masyarakat	2 lokasi 5 unit operasional	0	
4	Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah	Provinsi	Kapasitas Jaringan Komunikasi Data Kapasitas Jaringan Komunikasi Data Kapasitas Jaringan Komunikasi Data	6 interkoneksi 2 Lisensi aplikasi pendukung 1 Server	575.000.000	4	Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah	Provinsi	Kapasitas Jaringan Komunikasi Data Kapasitas Jaringan Komunikasi Data Kapasitas Jaringan Komunikasi Data	6 interkoneksi 2 Lisensi aplikasi pendukung 1 Server	575.000.000	

5	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Sistem Informasi	Luar Daerah, Provinsi	Jumlah insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi	0 insiden	115.100.000	5	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Sistem Informasi	Luar Daerah, Provinsi	Jumlah insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi	0 insiden	115.100.000	
6	Perumusan Kebijakan Teknis dan SDM Keamanan Informasi	Luar Daerah, Provinsi	Jumlah kebijakan dan sertifikasi SDM di Bidang Keamanan Informasi	1 kebijakan	1.344.388.000	6	Perumusan Kebijakan Teknis dan SDM Keamanan Informasi	Luar Daerah, Provinsi	Jumlah kebijakan dan sertifikasi SDM di Bidang Keamanan Informasi	1 kebijakan	1.344.388.000	
	Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian		Persentase peningkatan pemberdayaan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk birokrasi	6	400.000.000		Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian		Persentase peningkatan pemberdayaan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk birokrasi	6	400.000.000	
3	Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Provinsi , Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung , Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat	Jumlah layanan interaktif pemerintah dan masyarakat 6 kabupaten	20 kali layanan interaktif	400.000.000	3	Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Provinsi , Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung , Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat	Jumlah layanan interaktif pemerintah dan masyarakat 6 kabupaten	20 kali layanan interaktif	400.000.000	
	Persandian						Persandian					

	Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian		Rasio kualitas layanan persandian yang dimanfaatkan untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik Pemerintah daerah di lingkungan Pemprov Babel	100%	77.405.485		Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian		Rasio kualitas layanan persandian yang dimanfaatkan untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik Pemerintah daerah di lingkungan Pemprov Babel	100%	77.405.485	
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian	Provinsi , Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung , Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat	Jumlah layanan persandian yang bisa dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	5 Layanan	77.405.485	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian	Provinsi , Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung , Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat	Jumlah layanan persandian yang bisa dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	5 Layanan	77.405.485	
		TOTAL			14.779.538.424			TOTAL			14.779.538.424	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020
POVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Kegiatan	Lokasi	Volume Usulan	Keterangan
1	Pembangunan Gedung Data Center	Kabupaten Bangka Tengah	180 m2	Usulan Kab. Bangka Tengah
2	Pengadaan Peralatan Data Center	Kabupaten Bangka Tengah	1 paket	Usulan Kab. Bangka Tengah
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Command Center	Kabupaten Bangka Tengah	80 m2	Usulan Kab. Bangka Tengah
4	Pengadaan Peralatan Command Center	Kabupaten Bangka Tengah	1 paket	Usulan Kab. Bangka Tengah
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Media Center	Kabupaten Bangka Tengah	48 m2	Usulan Kab. Bangka Tengah
6	Pengadaan Peralatan Media Center	Kabupaten Bangka Tengah	1 paket	Usulan Kab. Bangka Tengah
7	Pembangunan Network Operating Center (NOC)	Kabupaten Belitung	1 paket	Usulan Kab. Belitung

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Visi Komunikasi dan informatika Tahun 2015 - 2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong-royong”.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah memberikan

gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan tujuannya :

1. Meningkatkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
2. Meningkatkan jaringan infrastruktur teknologi informasi untuk pemerintah daerah dan masyarakat;
3. Meningkatkan pengukuran kinerja yang akurat dan akuntabel

Sasaran

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Penyusunan sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 10 (Sepuluh) Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Perumahan dan Pemukiman;
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
5. Ketahanan Energi;
6. Ketahanan Pangan;
7. Penanggulangan Kemiskinan;
8. Infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman;
9. Pembangunan Wilayah;
10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Untuk mencapai 10 (sepuluh) Prioritas Nasional, diperlukan dukungan dari prioritas pembangunan daerah. Untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional tersebut terdapat 16 (enam belas) Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018. Pemilihan prioritas daerah dan

penyelarasan terhadap Prioritas Nasional dimaksudkan agar didalam implementasinya dapat lebih fokus dan lebih terarah dan dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun *stakeholder* lainnya.

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya layanan interaktif pemerintah kepada masyarakat
2. Meningkatnya jaringan infrastruktur teknologi informasi untuk layanan pemerintah dan layanan publik
3. Meningkatnya data dan informasi yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan;
4. Meningkatnya penerapan *e-Government* di Provinsi Kep Babel
5. Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung “***Babel Sejahtera, Provinsi Maju Yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi.***”

1. ***Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. ***Sejahtera*** menunjukkan bahwa Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. ***Maju*** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. ***Unggul*** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan dukungan semua sektor.

5. **Teknologi** dimaknai Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta untuk pencapaian Visi dan Misi yang Efisien dan Cepat serta berdaya saing berbasis teknologi

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 – 2022, yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Peningkatan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Peningkatan kesehatan masyarakat
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Misi I : Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;

Tujuan:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah
2. Meningkatkan Daya saing Daerah Unggul dalam Inovasi Agrobahari
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

Sasaran:

1. Penurunan Tingkat Pengangguran
2. Penurunan Tingkat kemiskinan
3. Menekan Laju Inflasi
4. Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk
5. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi
6. Perwujudan kemandirian energi dan mendorong penciptaan energi baru terbarukan
7. Peningkatan pembangunan berbasis industri
8. Peningkatan Produksi dan nilai tambah sektor pertambangan yang berwawasan lingkungan
9. Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil perikanan

10. Peningkatan produksi dan nilai tambah sektor perkebunan

11. Peningkatan pengembangan Pembangunan pariwisata

Misi II : Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;

Tujuan:

1. Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah;

Sasaran:

1. Pembangunan Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah;

Misi III : Peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul dan handal;

Tujuan:

1. Meningkatkan pembangunan Kualitas sumber daya manusia

Sasaran:

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat.

Misi IV : Peningkatan Kesehatan Masyarakat;

Tujuan:

1. Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat

Sasaran:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Misi V : Peningkatan Tata kelola pemerintah yang baik serta pembangunan demokrasi;

Tujuan:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas

Sasaran:

1. Peningkatan Manajemen Perubahan
2. Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Peningkatan Penataan dan penguatan organisasi
4. Peningkatan Penataan Tata Laksana
5. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
6. Peningkatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja

7. Peningkatan Penguatan Pengawasan
8. Perwujudan Pencapaian Opini Audit BPK
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Misi VI : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Tujuan:

1. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup

Sasaran:

1. Peningkatan Mitigasi dan Tanggap Darurat Bencana
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkait dengan tugas dan fungsi layanan utama Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas

Misi V. Peningkatan Tata kelola pemerintah yang baik serta pembangunan demokrasi

Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya visi misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022, maka pembangunan daerah tahun 2020 difokuskan untuk mencapai tujuan pembangunan: meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat, serta meningkatnya infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah.

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu: Urusan komunikasi dan informatika , urusan statistik dan urusan persandian.

Program - program pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari :

1. Program yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah:

- Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

2. Urusan Wajib Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Urusan Komunikasi dan Informatika:
 - Program Penyelenggaraan Pemerintah berbasis Teknologi Informasi
 - Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
 - Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian
- Urusan Statistik:
 - Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian
- Urusan Persandian
 - Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian

Pagu indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Untuk urusan komunikasi dan informatika sebesar Rp 10.421.678.000,00
2. Untuk urusan statistik sebesar Rp 678.446.939,00
3. Untuk urusan persandian sebesar Rp 77.405.485,00

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021(Rancangan Awal)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan								
0	0			-								
0	0	8		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Keseekretariatan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	100 %;4 Nilai	3.788.962.194			100 %;4 Nilai	
0	0	8	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	53 orang	2.673.154.194	-	pengurangan anggaran untuk belanja honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 135,360,000	53 orang	2.501.256.159
0	0	8	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	53 orang	142.230.000	-		53 orang	330.505.463

0	0	8	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	53 orang	132.550.000	-	Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 2.100.000	53 orang	104.880.825
0	0	8	4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	200 orang	578.328.000	-	Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 13.500.000	200 orang	506.426.208
0	0	8	5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	2 Dokumen	222.985.000	-	Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 39,650,000	2 Dokumen	54.600.000
0	0	8	6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	5 Laporan	39.715.000	-	Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 39,100,000	5 Laporan	66.145.000

4												
4	20			Statistik								
4	20	16		Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian		Rasio Ketersediaan informasi sektoral prioritas pertahun	0	464.406.939			0	
4	20	16	1	Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Sektoral dan Spatial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Format Dashboard	Provinsi	Jumlah layanan sistem informasi basis data spatial Prov Bangka Belitung dengan format dashboard	1 aplikasi	259.113.209	-	1) Pada TA 2019 aplikasi ini dibangun, lalu pada TA 2020 diusulkan untuk pengembangan seharusnya pada tahun 2020 aplikasi ini diimplementasikan terlebih dahulu. 2) Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 18,900,000	1 aplikasi	1.226.985.311
4	20	16	4	Inventarisasi dan Pengelolaan Data Sektoral Daerah	Provinsi	Jumlah ketersediaan data informasi statistik daerah yang telah diinventarisasi dan diolah	8 kelompok parameter	109.430.650	-	1) Mengubah lokasi kegiatan 2) Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 58,875,000	8 kelompok parameter	314.299.630

4	20	16	5	Pengembangan Satu Data/ One Data	Provinsi	Jumlah aparaturn perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya dalam pengembangan satu data daerah ditingkat Prov. Kep. Babel	104 orang	95.863.080	-	1) Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 10.400.000 2) Mengubah indikator dan target kegiatan	104 orang	793.224.000
4	16			Komunikasi dan Informatika								
4	16	15		Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase pemenuhan jaringan informasi di pulau terpencil; - Rasio intensitas informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata periode satu tahun; - Persentase jumlah sektor yang ada dengan informasi/ berita tiap sector yang dipublikasikan; Rasio informasi tentang pelayanan kesehatan dengan periode satu tahun; Persentase kesesuaian antara kuantitas berita dengan informasi yang dipublikasi	0 ;5 Jenis;13 Jenis;0 ;0	17.200.000.000			0 ;6 Jenis;14 Jenis;0 ;0	

4	16	15	1	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	1 Saluran	1.173.000.000	-	Mengubah indikator dan target kegiatan	1 Saluran	3.150.000.000
4	16	15	3	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka	Jumlah berita/informasi pemerintah daerah yang dipublikasikan	5.238 berita/informasi pertahun	15.016.060.000	-	Penambahan pagu dan output kegiatan, Mengubah indikator dan target kegiatan	5.736 berita/informasi pertahun	1.850.000.000
							0				0	
4	16	15	4	Pengelolaan Kemitraan	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan	Jumlah anggota PWI yang difasilitasi	4 orang	707.147.000	-	Mengubah indikator dan target kegiatan	5 orang	2.150.000.000
						Jumlah anggota KIM yang difasilitasi	175 orang				175 orang	

4	16	15	5	Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Luar Daerah, SKPD	Jumlah pengelola aspirasi publik lingkup pemerintah daerah yang difasilitasi	30 orang	303.793.000	-	Mengubah indikator dan target kegiatan	60 orang	1.400.000.000
4	16	16		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi		Rasio luas wilayah desa dengan luas cakupan pelayanan jaringan internet; Persentase SMA/SMK yang telah berbasis IT; Persentase insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi; - Persentase peningkatan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk birokrasi	5 Jaringan;1 Ada;0 ;0	7.096.395.000			5 Jaringan;1 Ada;0 ;0	
4	16	16	1	Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi	Luar Daerah, Provinsi	Jumlah layanan Infrastruktur dan teknologi	1 paket data center	4.157.015.000	-	1) Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 12,560,000 2) Mengubah indikator dan target kegiatan	1 paket data center	3.559.543.250

						Jangka waktu layanan colocation	12 bulan				12 bulan	
						Jangka waktu layanan paket internet	12 bulan				12 bulan	
4	16	16	2	Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government	Provinsi	kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government	5 lisensi aplikasi pendukung	860.380.000	-	Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 122,250,000	7 lisensi aplikasi pendukung	2.231.980.520
						kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government	5 aplikasi layanan				6 aplikasi layanan	
						kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government	40 website				40 website	
4	16	16	4	Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah	SKPD	Kapasitas Jaringan Komunikasi Data	6 interkoneksi	545.000.000	-	Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 30.000.000	3 interkoneksi	432.000.000

						Kapasitas Jaringan Komunikasi Data	2 instalasi jaringan komunikasi				3 instalasi jaringan komunikasi	
						Kapasitas Jaringan Komunikasi Data	10 peralatan jaringan komputer				1 peralatan jaringan komputer	
4	16	16	5	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Sistem Informasi	SKPD	Jumlah insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi	0 insiden	113.000.000	-	Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 2.100.000	0 insiden	198.450.000
4	16	16	6	Perumusan Kebijakan Teknis dan SDM Keamanan Informasi	Luar Daerah, Provinsi	Jumlah kebijakan teknis di Bidang Keamanan Informasi	2 kebijakan	1.421.000.000	-	Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 23,388,000 dan penambahan sebesar Rp 100.000.000 dari pengurangan honorarium kegiatan lain	1 kebijakan	190.000.000

4	16	17		Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian		Persentase peningkatan pemberdayaan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk birokrasi	6	390.700.000			6	
4	16	17	3	Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Provinsi	Jumlah pemberdayaan TIK yang diperoleh masyarakat	21 kali	390.700.000	-	Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 9,300,000	20 kali	683.016.690
4	21			Persandian								

4	21	15		Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian		Rasio kualitas layanan persandian yang dimanfaatkan untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik Pemerintah daerah di lingkungan Pemprov Babel	100%	72.405.485			100%	
4	21	15	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian	Provinsi	Jumlah layanan persandian yang bisa dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	5 Layanan	72.405.485	-	1)Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 5.000.000 2) Mengubah lokasi kegiatan	5 Layanan	77.405.485
					TOTAL			29.012.869.618				21.820.718.541

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi. Disisi lain posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan serta visi dan misi.

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah.

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu: Urusan komunikasi dan informatika , urusan statistik dan urusan persandian.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program-program pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari :

1. Program yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah:

- Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

2. Urusan Wajib Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Urusan Komunikasi dan Informatika:
 - Program Penyelenggaraan Pemerintah berbasis Teknologi Informasi

- Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
- Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian
- Urusan Statistik:
- Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian
- Urusan Persandian
- Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian

Pagu Indikatif merupakan batasan anggaran yang diberikan kepada masing-masing OPD untuk merencanakan program/kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penentuan pagu indikatif tidak lagi menganut “*money follow function*” akan tetapi berasaskan “*money follow priority programme*”.

Pagu indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Untuk urusan komunikasi dan informatika sebesar Rp 10.887.095.000,00
2. Untuk urusan statistik sebesar Rp 464.406.939,00
3. Untuk urusan persandian sebesar Rp 72.405.485,00

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 terdiri dari 4 (empat) program dan 20 (dua puluh) kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 15.021.769.618,00 yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan pemerintah terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif Rp 3.597.862.194,00.
Program dan kegiatan ini adalah rutin kantor dengan lokasi di pangkalpinang.
 - a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu indikatif sebesar Rp 2.482.054.194,00
 - b. Kegiatan Sarana dan prasarana Aparatur dengan pagu indikatif sebesar Rp 142.230.000,00
 - c. Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur dengan pagu indikatif sebesar Rp 132.550.000,00
 - d. Kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu indikatif sebesar Rp 578.328.000,00

- e. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp 222.985.000,00
 - f. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu indikatif sebesar Rp 39.715.000,00
2. Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif Rp 927.512.424,00:
- a. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Sektoral dan Spatial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan format Dashboard dengan pagu indikatif sebesar Rp 259.113.209,00
 - b. Kegiatan Inventarisasi dan Pengelolaan data Sektoral daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp 109.430.650,00
 - c. Kegiatan Pengembangan Satu data/ One Data dengan pagu indikatif Rp 95.863.080,00
 - d. Kegiatan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan pagu indikatif sebesar Rp 390.700.000,00
 - e. Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sumber daya Persandian dengan pagu indikatif sebesar Rp 72.405.485,00
3. Program Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi, terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif Rp 7.096.395.000,00.
- a. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi dengan pagu indikatif sebesar Rp 4.157.015.000,00
 - b. Kegiatan Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis e-Government dengan pagu indikatif sebesar Rp 860.380.000,00
 - c. Kegiatan Penguatan Jaringan Komunikasi data Pemerintah dengan pagu indikatif sebesar Rp 545.000.000,00
 - d. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Sistem Informasi dengan pagu indikatif sebesar Rp 113.000.000,00
 - e. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan SDM Keamanan Informasi dengan pagu indikatif sebesar Rp 1.421.000.000,00

4. Program Informasi dan Komunikasi publik, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif Rp 3.400.000.000,00 program dan kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan informasi dan komunikasi publik.
 - a. Kegiatan Pengelolaan saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp 1.173.000.000,00
 - b. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan pagu indikatif sebesar Rp1.216.060.000,00
 - c. Kegiatan Pengelolaan Kemitraan dengan pagu indikatif sebesar Rp 707.147.000,00
 - d. Kegiatan Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp 303.793.000,00

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan								
0	0			-								
0	0	8		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	100 %;4 Nilai	3.597.862.194			100 %;4 Nilai	

0	0	8	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	53 orang	2.482.054.194	-	pengurangan anggaran untuk belanja honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 135,360,000	53 orang	2.501.256.159
0	0	8	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	53 orang	142.230.000	-		53 orang	330.505.463
0	0	8	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	53 orang	132.550.000	-	Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 2.100.000	53 orang	104.880.825
0	0	8	4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	200 orang	578.328.000	-	Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 13.500.000	200 orang	506.426.208

0	0	8	5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	2 Dokumen	222.985.000	-	Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 39,650,000	2 Dokumen	54.600.000
0	0	8	6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	5 Laporan	39.715.000	-	Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 39,100,000	5 Laporan	66.145.000
4												
4	20			Statistik								
4	20	16		Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian		Rasio Ketersediaan informasi sektoral prioritas pertahun	0	464.406.939			0	

4	20	16	1	Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Sektoral dan Spatial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Format Dashboard	Provinsi	Jumlah layanan sistem informasi basis data spatial Prov Bangka Belitung dengan format dashboard	1 aplikasi	259.113.209	-	1) Pada TA 2019 aplikasi ini dibangun, lalu pada TA 2020 diusulkan untuk pengembangan seharusnya pada tahun 2020 aplikasi ini diimplementasikan terlebih dahulu. 2) Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 18,900,000	1 aplikasi	1.226.985.311
4	20	16	4	Inventarisasi dan Pengelolaan Data Sektoral Daerah	Provinsi	Jumlah ketersediaan data informasi statistik daerah yang telah diinventarisasi dan diolah	8 kelompok parameter	109.430.650	-	1) Mengubah lokasi kegiatan 2) Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 58,875,000	8 kelompok parameter	314.299.630

4	20	16	5	Pengembangan Satu Data/ One Data	Provinsi	Jumlah aparaturnya perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya dalam pengembangan satu data daerah ditingkat Prov. Kep. Babel	104 orang	95.863.080	-	1) Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 10.400.000 2) Mengubah indikator dan target kegiatan	104 orang	793.224.000
4	16			Komunikasi dan Informatika								

4	16	15		Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase pemenuhan jaringan informasi di pulau terpencil; - Rasio intensitas informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata periode satu tahun; - Persentase jumlah sektor yang ada dengan informasi/ berita tiap sector yang dipublikasikan; Rasio informasi tentang pelayanan kesehatan dengan periode satu tahun; Persentase kesesuaian antara kuantitas berita dengan informasi yang dipublikasi	0 ;5 Jenis;13 Jenis;0 ;0	3.400.000.000			0 ;6 Jenis;14 Jenis;0 ;0	
4	16	15	1	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka,	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	1 Saluran	1.173.000.000	-	Mengubah indikator dan target kegiatan	1 Saluran	3.150.000.000

					Pangkal Pinang							
4	16	15	3	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Provinsi	Jumlah berita/informasi pemerintah daerah yang dipublikasikan	5.736 berita/informasi pertahun	1.216.060.000	-	Mengubah indikator dan target kegiatan	5.736 berita/informasi pertahun	1.850.000.000
4	16	15	4	Pengelolaan Kemitraan	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Jumlah anggota PWI yang difasilitasi	4 orang	707.147.000	-	Mengubah indikator dan target kegiatan	5 orang	2.150.000.000
						Jumlah anggota KIM yang difasilitasi	175 orang				175 orang	
4	16	15	5	Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Luar Daerah, SKPD	Jumlah pengelola aspirasi publik lingkup pemerintah daerah yang difasilitasi	30 orang	303.793.000	-	Mengubah indikator dan target kegiatan	60 orang	1.400.000.000

4	16	16		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi		Rasio luas wilayah desa dengan luas cakupan pelayanan jaringan internet; Persentase SMA/SMK yang telah berbasis IT; Persentase insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi; - Persentase peningkatan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk birokrasi	5 Jaringan;1 Ada;0;0	7.096.395.000			5 Jaringan;1 Ada;0;0	
4	16	16	1	Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi	Luar Daerah, Provinsi	Jumlah layanan Infrastruktur dan teknologi	1 paket data center	4.157.015.000	-	1) Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 12,560,000 2) Mengubah indikator dan target kegiatan	1 paket data center	3.559.543.250

						Jangka waktu layanan colocation	12 bulan				12 bulan	
						Jangka waktu layanan paket internet	12 bulan				12 bulan	
4	16	16	2	Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government	Provinsi	kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government	5 lisensi aplikasi pendukung	860.380.000	-	Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 122,250,000	7 lisensi aplikasi pendukung	2.231.980.520
						kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government	5 aplikasi layanan				6 aplikasi layanan	
						kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government	40 website				40 website	
4	16	16	4	Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah	SKPD	Kapasitas Jaringan Komunikasi Data	6 interkoneksi	545.000.000	-	Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 30.000.000	3 interkoneksi	432.000.000

						Kapasitas Jaringan Komunikasi Data	2 instalasi jaringan komunikasi				3 instalasi jaringan komunikasi	
						Kapasitas Jaringan Komunikasi Data	10 peralatan jaringan komputer				1 peralatan jaringan komputer	
4	16	16	5	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Sistem Informasi	SKPD	Jumlah insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi	0 insiden	113.000.000	-	Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 2.100.000	0 insiden	198.450.000
4	16	16	6	Perumusan Kebijakan Teknis dan SDM Keamanan Informasi	Luar Daerah, Provinsi	Jumlah kebijakan teknis di Bidang Keamanan Informasi	2 kebijakan	1.421.000.000	-	Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 23,388,000 dan penambahan sebesar Rp 100.000.000 dari pengurangan honorarium kegiatan lain	1 kebijakan	190.000.000
4	16	17		Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian		Persentase peningkatan pemberdayaan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk birokrasi	6	390.700.000			6	

4	16	17	3	Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Provinsi	Jumlah pemberdayaan TIK yang diperoleh masyarakat	21 kali	390.700.000	-	Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 9,300,000	20 kali	683.016.690
4	21			Persandian								
4	21	15		Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian		Rasio kualitas layanan persandian yang dimanfaatkan untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik Pemerintah daerah di lingkungan Pemprov Babel	100%	72.405.485			100%	
4	21	15	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian	Provinsi	Jumlah layanan persandian yang bisa dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	5 Layanan	72.405.485	-	1) Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 5.000.000 2) Mengubah lokasi kegiatan	5 Layanan	77.405.485
					TOTAL			15.021.769.618				21.820.718.541

BAB V

PENUTUP

Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 yang memuat tentang review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah yang berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan awal RKPD, penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat, dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertujuan untuk mengoptimalkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Rencana Kerja (Renja) PD dengan sebaik-baiknya.
3. Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil forum SKPD Provinsi, menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD Provinsi untuk selanjutnya dibahas di dalam Musrenbang RKPD Provinsi.

. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan adanya sinergitas ini dan didukung dengan tujuan bersama, diharapkan sasaran pembangunan dapat tercapai dengan lebih baik, sehingga dapat

berorientasi pada kesejahteraan rakyat terutama masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Juni 2019

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI
NIP. 19640915 199002 1 002

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan							
0	0										
0	0	8		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	100 %;4 Nilai	3,788,962,194			100 %;4 Nilai	
0	0	8	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	53 orang	2,673,154,194	-	pengurangan anggaran untuk belanja honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 135,360,000	53 orang	2,501,256,159
0	0	8	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	53 orang	142,230,000	-		53 orang	330,505,463
0	0	8	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	53 orang	132,550,000	-	Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 2.100.000	53 orang	104,880,825
0	0	8	4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	200 orang	578,328,000	-	Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 13.500.000	200 orang	506,426,208
0	0	8	5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	2 Dokumen	222,985,000	-	Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 39,650,000	2 Dokumen	54,600,000

0	0	8	6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	5 Laporan	39,715,000	-	Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 39,100,000	5 Laporan	66,145,000
4												
4	20			Statistik								
4	20	16		Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian		Rasio Ketersediaan informasi sektoral prioritas pertahun	0	464,406,939			0	
4	20	16	1	Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Sektoral dan Spatial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Format Dashboard	Provinsi	Jumlah layanan sistem informasi basis data spatial Prov Bangka Belitung dengan format dashboard	1 aplikasi	259,113,209	-	1) Pada TA 2019 aplikasi ini dibangun, lalu pada TA 2020 diusulkan untuk pengembangan seharusnya pada tahun 2020 aplikasi ini diimplementasikan terlebih dahulu. 2) Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 18,900,000	1 aplikasi	1,226,985,311
4	20	16	4	Inventarisasi dan Pengelolaan Data Sektoral Daerah	Provinsi	Jumlah ketersediaan data informasi statistik daerah yang telah diinventarisasi dan diolah	8 kelompok parameter	109,430,650	-	1) Mengubah lokasi kegiatan 2) Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 58,875,000	8 kelompok parameter	314,299,630
4	20	16	5	Pengembangan Satu Data/ One Data	Provinsi	Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya dalam pengembangan satu data daerah ditingkat Prov. Kep. Babel	104 orang	95,863,080	-	1) Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 10.400.000 2) Mengubah indikator dan target kegiatan	104 orang	793,224,000
4	16			Komunikasi dan Informatika								

4	16	15		Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase pemenuhan jaringan informasi di pulau terpencil; -Rasio intensitas informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata periode satu tahun; - Persentase Jumlah sektor yang ada dengan informasi/ berita tiap sector yang dipublikasikan; Rasio Informasi tentang pelayanan kesehatan dengan periode satu tahun; Persentase kesesuaian antara kuantitas berita dengan informasi yang dipublikasi	0 ;5 Jenis;13 Jenis;0 ;0	17,200,000,000			0 ;6 Jenis;14 Jenis;0 ;0	
4	16	15	1	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	1 Saluran	1,173,000,000	-	Mengubah indikator dan target kegiatan	1 Saluran	3,150,000,000
4	16	15	3	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka	Jumlah berita/informasi pemerintah daerah yang dipublikasikan	5.238 berita/informasi pertahun	15,016,060,000	-	Penambahan pagu dan output kegiatan, Mengubah indikator dan target kegiatan	5.736 berita/informasi pertahun	1,850,000,000
							0				0	

4	16	15	4	Pengelolaan Kemitraan	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan	Jumlah anggota PWI yang difasilitasi	4 orang	707,147,000	-	Mengubah indikator dan target kegiatan	5 orang	2,150,000,000
						Jumlah anggota KIM yang difasilitasi	175 orang				175 orang	
4	16	15	5	Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Luar Daerah, SKPD	Jumlah pengelola aspirasi publik lingkup pemerintah daerah yang difasilitasi	30 orang	303,793,000	-	Mengubah indikator dan target kegiatan	60 orang	1,400,000,000
4	16	16		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi		Rasio luas wilayah desa dengan luas cakupan pelayanan jaringan internet; Persentase SMA/SMK yang telah berbasis IT; Persentase insiden atau penyimpangan keamanan sistem Informasi; - Persentase peningkatan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk birokrasi	5 Jaringan;1 Ada;0 ;0	7,096,395,000			5 Jaringan;1 Ada;0 ;0	
4	16	16	1	Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi	Luar Daerah, Provinsi	Jumlah layanan Infrastruktur dan teknologi	1 paket data center	4,157,015,000	-	1) Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 12,560,000 2) Mengubah indikator dan target kegiatan	1 paket data center	3,559,543,250
						Jangka waktu layanan colocation	12 bulan				12 bulan	
						Jangka waktu layanan paket internet	12 bulan				12 bulan	
4	16	16	2	Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government	Provinsi	kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government	5 lisensi aplikasi pendukung	860,380,000	-	Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 122,250,000	7 lisensi aplikasi pendukung	2,231,980,520

[illegible]

4	21	15		Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian		Rasio kualitas layanan persandian yang dimanfaatkan untuk pengamanan Informasi berklasifikasi dan strategis milik Pemerintah daerah di lingkungan Pemprov Babel	100%	72,405,485			100%	
4	21	15	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian	Provinsi	Jumlah layanan persandian yang bisa dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	5 Layanan	72,405,485	-	1)Pengurangan honorarium pelaksana dan tim teknis kegiatan sebesar Rp 5.000.000 2) Mengubah lokasi kegiatan	5 Layanan	77,405,485
					TOTAL			29,012,869,618				21,820,718,541